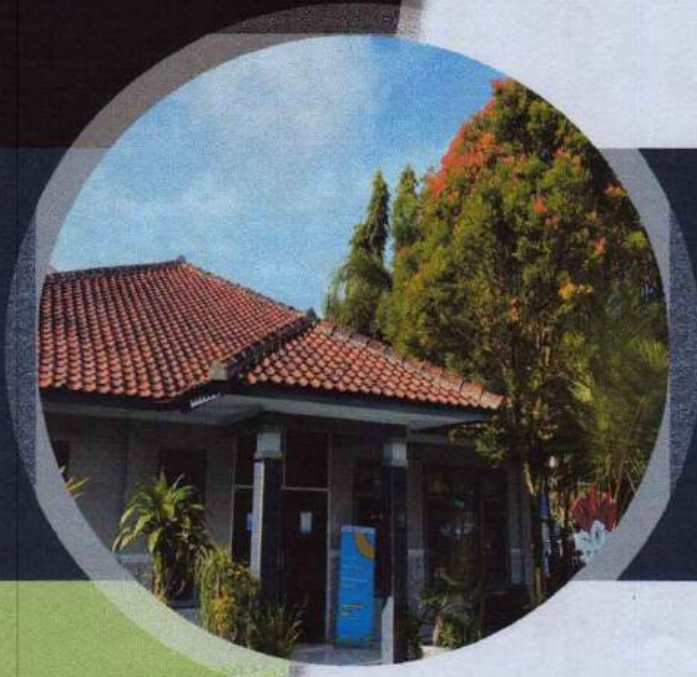




DIN
SOS
CIAMIS



RENCANA KERJA

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk Tahun Anggaran 2024.

Dengan tersusunya Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis ini dapat dijadikan pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan yang merupakan media penilaian Rencana Strategis yang perlu dijabarkan kembali dalam Rencana Kinerja (RKT) Tahunan.

Rencana Kinerja Tahunan ini didalamnya merupakan penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2024.

Dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami telah berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam proses penyusunannya mengalami berbagai hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini, dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik bagi setiap program kegiatan yang dilaksanakan.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kinerja (RKT) ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna, serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis.

Ciamis, Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial



Eka Permana Oktaviana, ST, M.A.P.
Pembina Utama Muda, IV/b
NIP. 19761014 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS SOSIAL
Jalan Tentara Pelajar Nomor 1-3 Telepon (0265) 771096
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 800.1.5/Kpts. 071 /Dinsos.1/2023

TENTANG :

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
 - b. bahwa untuk mengimplementasikan terlaksananya Pembangunan yang berkesinambungan, maka perlu disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan Tahun 2024;
 - c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu segera menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) untuk 1 (satu) tahun di Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis Peraturan Bupati Ciamis Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2023;

Memperhatikan :

1. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
- : Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- : Komponen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, terdiri dari :
- Sasaran yang ingin dicapai dalam Tahun 2024;
 - Program Yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial untuk Tahun 2019-2024;
 - Kegiatan yang merupakan tindakan dalam memanfaatkan Sumber Daya yang ada sesuai dengan kebijakan dan program yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial 2019-2024, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2024;
 - Penentuan Indikator Kinerja Kegiatan yang terukur secara kuantitatif atau kualitatif, dapat menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dalam satu tahun dari Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2019-2024.
- : Lampiran Keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 6 Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial



Eka Permiana Oktaviana, ST, M.A.P.
Pembina Utama Muda, IV/b
NIP. 19761014 200212 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
SK RENJA TAHUN 2023	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KINERJA SKPD TAHUN LALU	7
2.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2022	7
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan III Tahun 2023	15
2.3. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis	34
2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	37
3.3 Program dan kegiatan	39
BAB IV. PENUTUP	42
LAMPIRAN - LAMPIRAN	43
RENCANA KERJAJA AWAL 2024	50

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini memiliki makna bahwa pemerintahan daerah melaksanakan pembangunan sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menetapkan dalam ketentuan umum bahwa, Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kinerja Tahunan ini memuat pula Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, bertujuan untuk menguraikan program dan kegiatan Dinas Sosial secara sistematis mulai dari sasaran dan pembiayaan sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun.

Sejalan dengan mekanisme Perencanaan Pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2004, Visi dan Misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja serta dengan adanya komitmen bersama, akan tercipta suatu kesepahaman, kesepakatan, dalam pelaksanaan tugas dengan tujuan meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal, diharapkan pula dapat menciptakan masyarakat yang produktif hingga dapat menciptakan usaha baru sesuai dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dinas Sosial dalam Penyusunan Rencana Kinerja ini mempunyai harapan yang hendak dicapai dan mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Efektivitas kegiatan dapat ditingkatkan dengan sistem penyusunan perencanaan yang baik dan berhati-hati agar tidak terjadi pemborosan dan kerugian bagi Negara oleh karena itu monitoring pelaksanaan kegiatan dan pengawasan internal sangat dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang System Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Bupati Ciamis Nomor Tahun 2023 Tentang RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2024;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 ini adalah sebagai dokumen Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang menguraikan berbagai Program dan kegiatan Dinas Sosial secara sistematis mulai dari sasaran, pembiayaan, indikator kinerja dan rencana tingkat pencapaian (target) secara langsung yang dapat terukur sebagai tindakan nyata dalam waktu satu tahun.

Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2024 merupakan dasar untuk penentuan pembuatan KUA-PPAS yang dilanjutkan untuk penentuan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan DPA-SKPD.

1.3 Sistematikan Penulisan

SK Tim Penyusun

Perbup tentang Renja PD

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 DAN REALISASI RENSTRA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2021

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2023

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

Lampiran - RENCANA KERJAJA AWAL 2024

BAB II
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2022 DAN REALISASI RENSTRA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

**2.1 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2022**

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis pada Tahun 2022 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan, adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan atau yang telah direalisasikan sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan pada tahun 2022. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2022, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, dalam rangka mendukung upaya pencapaian dari misi 3 Membangun Perekonomian Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Lokal, dengan sasaran Meningkatnya Pelayanan kesejahteraan Sosial, Maka program/kegiatan pembangunan bidang sosial dapat disajikan pada Tabel 2.1 dibawah ini

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2022

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja OPD tahun 2023 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra OPD s/d tahun berjalan		Catatan
						Target Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja OPD tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	URUSAN WAJIB BIDANG SOSIAL											
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang meningkatkan kapasitasnya	Persentase	100	100	-	-	-			-	-
		Persentase PPKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial	Persentase	100	100	100	98,2	98,2	100	298,2	74,55	-
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS yang dikembangkan	Persentase	100	100	100	98,2	98,2	100	298,2	74,55	-

1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	221	-				221	221	55,25	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya	orang	27	27	27	27	100	27	82	20,5	-
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya	orang	1	-				2	2	0,5	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	lembaga	10	41	21	20	95,24	14	75	18,75	-
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	sertifikat	8	8	7	7	100	8	23	5,75	-
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase warga negara migran yang terselesaikan dalam penyelesaian kasusnya	presentase	100	-				100	100	25	

	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debaraksi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase warga negara migran yang terfasilitasi dalam penanganannya pemulangannya	100								100	100	100	25	
	REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya setelah rehabilitasi (SPM)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	-
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	75	-
6	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	1200	30	50	50	50	50	50	100	1297	1377	344,25	-	
7	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	20	20	26	26	26	26	26	100	15	61	15,25	-	
8	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20	16	14	14	14	14	14	100	18	48	12	-	

9	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	45	100	15	15	100	60	175	43,75	-
10	Pemberian Layanan Kedaruratan (Dinas Sosial)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	100					25	25	6,25	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga (Dinas Sosial)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/kota	orang	-					15	15	3,75	
12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	-					25	25	6,25	-
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PPKS lainnya diluar Panti yang mendapatkan rehabilitasi		100	100	100	100	100	100	300	75	
13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan	orang	-	92	100	100	100		192	48	
14	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	Orang	-					80	80	20	
15	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan	orang	1500					2144	2144	536	
	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	300	75	-
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	Persentase	100	100	100	100	100	100	300	75	-

16	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase validitas data fakir miskin Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	300	75	-
17	Penjangkauan anak-anak terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	15	-	15	15	100	100	15	15	100	100	30	7,5	-
18	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin yang terkelola	100	100	100	98,87	100	98,87	100	98,87	98,87	298,87	74,72	-	-
19	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	797.372	12	323.002	323.002	100	323.002	797.372	100	323.002	1.120.386	280,10	-	-
20	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	196.845	1250	62.605	62.605	100	62.605	196.845	100	62.605	260.700	65,175	-	-
21	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	300	233	10.523	10.404	98,87	10.404	1040	1040	10.523	11.677	2,92	-	-
21	Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (Dinas Sosial)	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	15	-	-	-	-	-	15	15	-	15	3,75	-	-

	PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	300	75	-
22	Penyediaan Makanan (Dinas Sosial)	Jumlah Orang Yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Penggantian) Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	1665	600	1000	1000	1000	100	1665	3.265	816,25		
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase desa rawan bencana yang meningkat kapasitas kesiapsiagaannya	Persentase	100	100	100	100	100	100-	100	300	75	-	
23	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	kampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	55	55	50	50	50	100	55	162	40,5		
	PENGLOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	300	75	-	
		Persentase Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang di rehabilitasi	Persentase											

	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik.	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	300	75	-
25	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan	makam	226	226	226	226	226	226	226	226	678	169,5	-

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Tabel Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 di bawah ini.

Tabel 2.2

HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS SOSIAL TRIWULAN III TAHUN 2023

NO.	Program	Target		Kinerja	Realisasi		Kinerja (%)
		Rp.	%	%	Rp.	%	
	Urusan Wajib Sosial						
1	Pemberdayaan Sosial	1.515.791.400	100	100	668.298.000	44,1	93,4
2	Penanganan Warga Negara Migran Tindak kekerasan	10.000.000	100	100	5.000.000	50	50
3	Rehabilitasi Sosial	890.997.600	100	100	730.702.600	82,0	98,8
4	Perlindungan dan Jaminan Sosial	9.364.705.000	100	100	3.170.844.000	33,9	91,80
5	Penanganan Bencana	337.797.000	100	100	272.057.000	80,5	100
6	Pengelolaan Taman makam Pahlawan	33.810.000	100	100	18.020.000	53	100

Sumber data: Lap. Triwulan III Tahun 2023

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2023 sampai dengan Triwulan III, Realisasi keuangan belum ada yang mencapai 100% akan tetapi capaian kinerja sudah ada yang mencapai 100%. Karena Target capaian kinerja tersebut untuk penanganan bencana dan pemeliharaan makam pahlawan, setiap bulan terlaksana sesuai target. Sedangkan untuk Penanganan Waga Migran Tindak Kekerasan ini berupa santunan terhadap WNM yang meninggal dunia, sehingga tidak dapat diprediksi.

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, Kepala Dinas Sosial membuat perjanjian kinerja dengan Bupati untuk masa satu tahun yang memuat sasaran strategis, dan indikator kinerja terkait dengan tugas dan fungsi.

Pada Perjanjian kinerja Tahun 2023 terdapat 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 indikator sasaran untuk level eselon II termasuk didalamnya kegiatan Non Urusan. Sedangkan pada level eselon III dan IV jumlah indikatornya semakin bertambah sesuai dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, selengkapnya sebagaimana tabel halaman berikut.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2023
1.	2.	3.	4.
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2 Level Maturitas SPIP 3 Hasil Evaluasi AKIP 4. Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan 1 Meningkatkan Kesejahteraan PPKS 2 Meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS	90 3 BB 650 100%
2	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	3 Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik	100%

NO.	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	3.947.123.500	APBD II
II	Program Pemberdayaan Sosial	1.679.891.400	APBD II
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	17.000.000	APBD II
IV	Program Rehabilitasi Sosial	973.667.600	APBD II
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.297.549.500	APBD II
VI	Program Penanganan Bencana	356.547.000	
VII	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	83.280.000	
JUMLAH		15.355.059.000	

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2023, Dinas Sosial mendapat dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Ciamis sebesar Rp. 15.355.059.000,- yang digunakan untuk melaksanakan 32 Sub Kegiatan, 19 kegiatan yang terangkum dalam 6 program sebagaimana tabel 2.1 dibawah ini;

Tabel 2.3.1
Program yang dilaksanakan Tahun 2023

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Penunjang urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	3.947.123.500
2.	Program Pemberdayaan Sosial	1.679.891.400
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	17.000.000
4.	Program Rehabilitasi Sosial	973.667.600
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	8.297.549.500
6.	Program Penanganan Bencana	356.547.000
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	83.280.000
	Jumlah	15.355.059.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tahun 2023

Dari anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya sasaran strategis Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2023, selengkapny sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3.2
Sasaran Strategis PK Dinas Sosial Tahun 2023

No.	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp.)
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien (Non Urusan)	3.947.123.500
2.	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	11.407.935.500
	Jumlah	15.355.059.000

Sumber : Dokumen PK Dinas Sosial Tahun 2023

Ke-2 sasaran strategis tersebut tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2019-2024 sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis guna menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DPA SKPD), Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja dan menyusun Laporan Kinerja (LKIP) sesuai dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024.

Selanjutnya mengenai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Tahun 2022 yang telah direvisi sebagaimana tertuang pada tabel halaman berikut :

Tabel 2.3.3
TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2019-2024

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Jumlah penduduk miskin dan PPKS yang tertangani	orang	n/a	144.361	173.143	164.185	155.126	146.248	137.310	137.310
2.	Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani	%	n/a	101	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase (%) PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen	99.94	100	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	31	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	72	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	78	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	n/a	14	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Tahun						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
8.	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase PKS yang berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial	Persen	n/a	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Yayasan/Panti	73	63	71	75	80	85	90	90	
11.	Hasil Evaluasi SAKIP	Kategori	B	B	B	BB	BB	BB	BB	BB	
12.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	n/a	80,75	86,3	86,3	90	90	90	90	
13.	Maturitas SPI	Level (Angka)	3	3	3	3	3	3	3	3	
14.	Kualitas Pelaporan Keuangan SOPD yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Angka	490	655	650	650	650	650	650	650	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, program kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2022 harus pula mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permenkos No. 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mulai di berlakukan pada Bulan Januari 2019 sehingga didalam Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial perlu diselaraskan agar seluruh Program dan kegiatan yang dilaksanakan tetap sinergis.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Sosial Tahun 2022 dinyatakan “berhasil” dari target yang telah ditetapkan, selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4.1
Capaian Indikator dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian %	Ket.
1.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90 point	80,59	89	
		Level Maturitas SPIP	4	3	75	
		Hasil Evaluasi AKIP	BB	BB	100	
		Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	650 point	826,8	127	
2.	Meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan PPKS	100 %	99,47 %	99,47	
		Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PPKS	100 %	100 %	100	
		Persentase sarana dan prasarana taman makam pahlawan dalam kondisi baik	100 %	100 %	100	

Sumber : Dokumen PK Dinas Sosial Tahun 2022

Berdasarkan data tersebut diatas, diketahui bahwa IKM mengalami penurunan sebesar 9,41 akan tetapi masih dalam kategori baik hal ini ada

perubahan dalam prosedur dan indikator penilaian. Penilaian pengelolaan keuangan meningkat dan menjadikan juara kedua dalam pengelolaan keuangan. Meningkatnya Kesejahteraan PPKS tidak mencapai 100% karena ada beberapa pelayanan kesejahteraan sosial yang tidak mencapai sesuai target diantaranya bantuan social hal ini tidak terealisasi karena tidak layak untuk mendapatkan bantuan.

B. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2.4 diatas, melihat secara keseluruhan, capaian kinerja yang sesuai target yaitu AKIP, Meningkatnya peran PSKS dalam penanganan PPKS. Penilaian pengelolaan keuangan melebihi target mencapai 127%, sedangkan untuk SPIP, IKM, Meningkatnya kesejahteraan social dibawah target, akan tetapi masih kategori baik melebihi 75%. Dengan capaian tersebut sebagai motivasi dalam bekerja untuk tetap sesuai taget yang telah ditetapkan karena sebagai penilaian atas kinerja OPD.

2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

Sebagai tolak ukur untuk melihat capaian kinerja Tahun 2021 maka perlu disandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021, selengkapnya sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini ;

Tabel 2.4.2
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	INDIKATOR	2021		2022	
		Target	Realisasasi	Target	Realisasi
1.	Persentase (%) PMKS yang mandiri atau berubah perilaku (IKU)				
2.	Persentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani	100%	94,41%	100%	99,47
3.	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	67,23%	100 %	100 %
4.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	98,58%	100 %	100 %

5.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	47,57%	100 %	100 %
6.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %
7.	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten Ciamis yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100 %	100 %	100 %	100 %
8.	Persentase (%) PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS/PPKS	100 %	99,63%	100 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Persentase (%) PMKS yang mandiri atau berubah perilaku mulai tahun 2021 tidak lagi digunakan sebagai indikator dalam PK Dinas Sosial dan pada Tahun 2022 dengan adanya perubahan sasaran Renstra maka indikatornya yaitu "Persentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani" dari target yang ditetapkan sebesar 100% terrealisasi sebesar 99,47 %, artinya tidak semua Penduduk Miskin dan PPKS yang diusulkan untuk penanganan social terealisasi sesuai target hal ini jumlah usulan tidak sebanding dengan jumlah kuota penanganan, sehingga yang tidak tertangani pada tahun 2022 diusulkan kembali pada tahun 2023.

Capaian indicator untuk kategori SPM seperti Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis serta penanganan korban bencana mencapai 100% dan PSKS yang berpartisipasi dalam program penanganan PPKS encapai 100 %. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dinas social dalam memberikan pelayanan kesejahteraan social kepada masyarakat. PPKS yang tidak tertangangani yaitu dalam bentuk pemberian bantuan sosia karena penerima bantuan tersebut meninggal dunia, pindah dan telah mendapatkan bantuan dari pihak lain.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target RPJMD dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Ciamis

Didalam target RPJMD Periode 2019 – 2024 ditetapkan target capaian sebagaimana tertuang didalam PK Dinas Sosial sebagaimana tabel halaman berikut ini ;

Tabel 2.4.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Renstra dan RPJMD Periode 2019-2024

No	Indikator	Realisasi Kinerja 2022	Target Renstra	Target RPJMD	Ket.
1.	Prosentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani	99,47%	100 %	100 %	
2.	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	100 %	100 %	
3.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	100 %	100 %	
4.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	100%	100 %	
5.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	100 %	100%	100 %	
6.	Persentase (%) korban bencana skala Kabupaten Ciamis yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (SPM)	100 %	100 %	100 %	
7.	Prosentase (%) PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS	100 %	100 %	100 %	

Berdasarkan tabel tersebut diatas diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Sosial pada Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target Renstra Dinas Sosial dan RPJMD sudah memenuhi target hingga 100% .

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional.

Standar nasional yang dijadikan perbandingan adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM) khususnya Bidang Sosial sebagai urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pusat dan daerah atau menjadi urusan konkuren.

Untuk perbandingan realisasi kinerja Tahun 2022 berdasarkan pada indikator SPM Baru sesuai Permensos No 9 Tahun 2018, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pemberlakuan SPM Baru mulai 1 Januari 2019. Oleh karena itu indikator yang digunakan adalah indikator baru, selengkapnya sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.4.4
Perbandingan Realisasi Tahun 2022 dengan Target SPM

No.	INDIKATOR	Tahun 2022	
		SPM	Realisasi
1.	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
2.	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
3.	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
4.	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100 %	100 %
5.	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	100 %	100 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas, bahwa pencapaian SPM di tahun 2022 sudah sesuai dengan target SPM yang ditetapkan yaitu semuanya mencapai 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan;

1) Faktor Pendukung Keberhasilan/Peningkatan ;

- a. Dukungan alokasi anggaran dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, Pusat dan pihak lain untuk melaksanakan pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PPKS.
- b. Adanya call center kemensos yang dimanfaatkan oleh warga masyarakat untuk pengaduan permasalahan social, sehingga dapat cepat ditiadakanlanjuti.
- c. Adanya bantuan social dan jaminan social baik dari kementerian social maupun daerah, membantu dalam penanggulangan kemiskinan;
- d. Bantuan logistik bencana dari pusat baik bantuan PSKBA maupun PSKBS sangat membantu dalam penyediaan logistik bencana untuk wilayah Kabupaten Ciamis.
- e. SDM Mitra Dinas Sosial seperti Pendamping PKH, TKSK, Pendamping Rehsos dan TKS sebagai pendamping dalam penyaluran Paket Sembako, TAGANA dalam penanganan berbagai bencana.

2) Faktor Penghambat / Kegagalan / Penurunan ;

- a. Focus anggaran Tahun 2022 untuk penanggulangan kemiskinan ;
- b. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menggunakan teknologi/aplikasi/jejaring komunikasi sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi;
- c. Masih banyaknya keluhan dari masyarakat dalam pengelolaan DTKS terutama dengan masih ditemukannya penduduk miskin yang belum terakomodir oleh program pemerintah, sementara yang kondisi sosial ekonominya telah mapan tetap mendapatkan bantuan sosial.

3) Alternatif / Solusi Yang Telah Dilakukan

1. Untuk meningkatkan capaian indikator terutama indikator SPM Sosial, maka perlu dilakukan penyesuaian indikator capaian, sebagai contoh, kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek

belajar kerja bagi anak terlantar yang proses pelaksanaannya sudah sampai tahap seleksi, maka indikatornya disesuaikan mengingat kegiatan sudah memasuki tahapan tinggal pelaksanaan.

2. Pengiriman pegawai dalam mengikuti berbagai pelatihan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian Sosial dalam upaya peningkatan profesionalisme pegawai terutama bagi pegawai yang tidak memiliki latar belakang profesi pekerjaan sosial sedikit banyak harus faham tentang permasalahan sosial
 3. Verifikasi dan validasi DTKS melalui aplikasi SIKS-NG terus dilakukan mulai dari tingkat Desa maupun kelurahan.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja ;

Melihat pagu anggaran Dinas Sosial Tahun 2022 sebesar Rp. 16.986.512.622,- apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 10.233.409.777,- maka mengalami kenaikan sebesar Rp.6.753.102.845,- atau sebesar 39,76 %, yaitu dari bantuan sosial.

Dukungan yang masih dirasakan belum optimal antara lain:

- a) Bantuan untuk pemberdayaan PPKS;
 - b) Mobil layanan kesejahteraan sosial ;
 - c) Belum terintegrasinya data kemiskinan.
7. Hambatan/Kendala Yang Dihadapi

Secara garis besar seluruh Program dan kegiatan pada Tahun 2022 terutama yang bersifat teknis bisa diselesaikan dan dilaksanakan sesuai perencanaan, namun masih ada Hambatan/Kendala yang dihadapi antara lain :

- 1) Keterbatasan SDM pelayanan Kesejahteraan social khususnya pemberdayaan PPKS.
- 2) Belum adanya Mobil layanan khusus pelayanan kesejahteraan sosial;
- 3) Adanya data kemiskinan dari berbagai sumber dan belum terintegrasi.

C. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran strategis Tahun 2022, dari pagu anggaran Rp.16.986.512.622,- tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 16.654.479.351,- atau 98,0 %. Selengkapnya sebagaimana tertera pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan daerah Kabupaten/Kota	3.314.117.622	3.309.139.351	99,8
2.	Program Pemberdayaan Sosial	804.530.000	794.030.000	98,7
3.	Program Rehabilitasi Sosial	182.560.000	182.555.000	100
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	12.188.265.000	11.875.065.000	97,4
5.	Program Penanganan Bencana	46.560.000	465.210.000	99,3
6.	Program Pengelolaan Taman makam Pahlawan	28.480.000	28.480.000	100
	JUMLAH	16.986.512.622	16.654.479.351	98,0

Sumber Data: LKIP Dinas Sosial Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari aspek penggunaan anggaran Tahun 2022 dengan capaian sebesar 98,0 %, atau secara pengelolaan anggaran mengalami peningkatan dibanding Tahun 2021 yang capainya sebesar 94,41 %. Yang tidak terserap 100% adalah dari belanja pegawai, Hibah yang dikembalikan karena tlah mendapatkan bantuan tahun 2021, bansos yang tidak memenuhi syarat dan kelebihan uang transpoer kegiatan. Ada 2 (dua) program yang capainya 100% dan 4 (empat) program dibawah angka 100%. Realisasi anggaran jika dibandingkan dengan realisasi kinerja capainya sedikit lebih rendah dari realisasi kinerja, karena realisasi kinerja tahun ini mengalami penurunan menjadi 99,1 % dibandingkan dengan Tahun 2021 dengan capaian sebesar 99,85 %, penurunan ini berasal dari jumlah masyarakat yang mendapat bantuan sosial tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Selengkapnya sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran	Realisasi Kinerja	%
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (Non Urusan)	97,26 %	97,75 %	98,69 %
2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi perangkat daerah (Non Urusan)	97,00 %	100 %	98,5 %
3.	Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	88,53 %	89,25 %	90,4 %
4.	Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan masyarakat miskin dan PPKS	99,77 %	100 %	99,89 %
	Jumlah Total	94,15 %	93,50 %	93,83 %

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Ciamis Tahun 2019 S/D Tahun 2022

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra OPD					Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan Sosial	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	78,62	123,4	93,55	98,70	
2	Persentase PMKS/PPKS yang tertangani	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100	129,82	94,41	99,47	
3	Persentase PMKS/PPKS skala yang memperoleh bantuan social untuk pemenuhan kebutuhan dasar	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	90,3	85,61	81,7	69	
4	Persentase panti social yang menerima program pemberdayaan social melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosocial ekonomi sejenis lainnya	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100	n/a	n/a	n/a	
5	Persentase panti social yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan social	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100	100	100	

		Di ciamis tidak ada																		
6	Persentase kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	-	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
10	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial diluar Panti (SPM)	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11	Persentase Anak Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
12	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Luar Panti (SPM)	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

13	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di luar Panti (SPM)	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (SPM)	100 %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa ada 3 (tiga) indikator yang meunjukkan kenaikan diatas 100 % yaitu Persentase PMKS/PPKS yang memperoleh bantuan Sosial, Persentase PMKS/PPKS yang tertangani, dan Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Luar Panti (SPM) pada tahun 2020 karena pada tahun ini pada masa pandemi covid-19 sehingga banyak bantuan yang disalurkan terutama untuk kelompok rentan yaitu lanjut usia terlantar.

Sedangkan indikator yang capaiannya kurang dari 100% bahkan tidak sampai 50% adalah dari indikator Persentase Lanjut Usia Terlantar yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial di Luar Panti (SPM) tahun 2021 Hal ini di karenakan PPKS lanjut usia terlantar diusulkan kembali untuk penerima bantuan di tahun 2021 akan tetapi realisasi diutamakan yang belum mendapatkan bantuan sama sekali.

2.5 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan SKPD

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu-isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Ciamis sebagai berikut : “ *Penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial* “. Isu tersebut ada sedikit perubahan berkenaan dengan adanya perubahan SOTK Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja menjadi dinas tersendiri, sehingga isu strategisnya berubah dan memunculkan pada upaya “ *penanggulangan kemiskinan dan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)* : sebagai sasaran pokok dan utama dari Dinas Sosial.

Adapun permasalahan-permasalahan pada Dinas Sosial tersebut masih merupakan isu terkait dengan bidang sosial meliputi :

1. Belum terintegrasi data kemiskinan;
2. Jumlah PPKS yang terus bertambah dengan bertambahnya jumlah pada DTKS;
3. Pemberdayaan PPKS yang masih rendah;
4. Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
5. Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
6. Jumlah Bantuan PMKS masih terbatas.

2.6 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat terangkum dalam Daftar Prioritas Program dan Kegiatan Daerah sebagai hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) melalui mekanisme tahapan sesuai Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berbagai usulan dari tingkat bawah tidak seluruhnya dapat diakomodir sehubungan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya:

1. Program/kegiatan tersebut tidak masuk dalam bidang tugas Dinas Sosial;
2. Nomenklatur program/kegiatan tidak sesuai tidak terdapat pada Program dan kegiatan Dinas Sosial;
3. Alokasi anggaran terbatas sehingga harus ditentukan berdasarkan prioritas;
4. Jumlah sasaran penanganan yang kompleks dan luas sehingga perlu prioritas;
5. Proses penginputan usulan program kegiatan salah penempatan.

BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam menurunkan angka kemiskinan, yaitu:

- Meningkatnya pendapatan masyarakat
- Menurunnya beban pengeluaran masyarakat
- Berkurangnya kantong-kantong kemiskinan
- Terpadunya program pengentasan kemiskinan.

Terkait dengan strategi tersebut diatas, peran Dinas social dalam penurunan angka kemiskinan yaitu pada 2 indikator dengan program kegiatan yang terkaitnya adalah sebagai berikut:

- Menurunnya beban pengeluaran masyarakat
 - Pemberdayaan social
 - Rehabilitasi social
 - Perlindungan dan jaminan sosial
- Terpadunya program pengentasan kemiskinan.
- Pengelolaan DTKS

Dinas Sosial sebagai SKPD teknis memiliki sasaran garapan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 26 permasalahan sosialnya, dan salah satu indikatornya adalah penanganan fakir miskin.

Kebijakan Pemerintah sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin lebih mempertegas tugas dan fungsi Kementerian Sosial sebagai salah satu lembaga pemerintah yang ditunjuk secara langsung sebagai pelaksana program penanggulangan kemiskinan

dengan basis 1 (satu) pintu, diantaranya melalui Program PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program sembako.

Bantuan social di kabupaten ciamis khususnya di Dinas sosial Pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Sosial tahun 2022 ada 3 jenis bantuan social, yaitu Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sebanyak 382 KPM, Dana Bagi Hasil Chukai dan Tembakau (DBHCHT) sebanyak 518 orang serta bantuan langsung tunai dampak dari inflasi daerah kepada 9.730 orang diutamakan yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

Terkait dengan kebijakan nasional dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Dinas Sosial dihadapkan pada beberapa permasalahan terkait dengan isu-isu strategis yang menjadi prioritas pada periode 5 (lima) tahun ke depan adalah “*Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan ketenagakerjaan*”. Selanjutnya secara spesifik diprioritaskan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan keluarga miskin dengan meningkatkan peran serta pemerintah dan masyarakat melalui program Rehabilitasi social serta perlindungan dan jaminan sosial;
2. Pemberdayaan social diprioritaskan pada pengembangan kemandirian melalui peningkatan keterampilan dan penguatan akses bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS/PMKS) dalam memanfaatkan sistim sumber;
3. Dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS, diprioritaskan pada penanganan luar panti sesuai Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Sasaran Renja Tahun 2024 merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai tahun ke-5 (kelima) periode RPJMD 2019-2024.

Penetapan ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi, oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan kesejahteraan social dalam penangan PPKS (pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Indikator kinerja : Persentase Penduduk Miskin dan PPKS yang tertangani

2. Meningkatnya Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan masyarakat miskin dan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial).

Indikator kinerja : Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam program kesejahteraan sosial

3.3. Program Dan Kegiatan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 terdapat beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Baru yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2024 dengan total anggaran murni sebesar Rp. 8.230.108.415,- yang akan dilaksanakan melalui Program, Kegiatan dan Sub kegiatan terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (3 kegiatan 11 Sub kegiatan);
2. Program Pemberdayaan Sosial (1 kegiatan 1 sub kegiatan);
3. Program Rehabilitasi Sosial (1 kegiatan 1 sub kegiatan)
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial (1 kegiatan 1 sub kegiatan)
5. Program Penanganan Bencana (1 kegiatan 1 sub kegiatan)

Berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut memiliki sasaran indikator kinerja dan target sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

A. Urusan Dan Non Urusan

Tabel 3.1

SASARAN , INDIKATOR KINERJA DAN TARGET DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2024

Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Target 2024	
			4	5
1	2	3	4	5
Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		Terwujudnya Tata kelola pemerintahan yng efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas		
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil Evaluasi AKIP	BB Predikat	
		Hasil Penilaian Pengelolaan Keuangan	650 Nilai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 Nilai	
		Level Maturitas SPIP	3 Nilai	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan pelaporan keuangan perangkat daerah	100%	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bul	2.060.695.540
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	50.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	25.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	100.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	37.107.500
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.440.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan PD	100%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	200.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PPKS yang meningkat kapasitasnya	100%	
		Persentase PSKS yang berperan aktif dalam program kesejahteraan sosial	100%	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang dikembangkan	100%	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	500.000.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	. Persentase PPKS yang pulih keberfungsian sosialnya setelah rehabilitasi	100%	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	60 Orang	208.318.375

		Kewenangan Kabupaten/Kota		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang memperoleh bantuan sosial (TPB 1)	100%	
		Persentase anak terlantar yang mendapatkan perlindungan sosial	100%	
		Persentase validitas data fakir miskin	100%	
Persentase data fakir miskin yang dikelola	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	350 Keluarga	3.774.500.000
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	
Persentase korban bencana alam yang tertangani	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100%	
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 orang	

B. Bantuan Sosial Keuangan

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bantuan Sosial Kemasyarakatan untuk Rumah Tidak Layak Huni	3.774.500.000,-
	JUMLAH	3.774.500.000,-

C. Bantuan Hibah

NO	JENIS KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Bantuan Hibah Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Organisasi sosial dan Karang Taruna	395.000.000,-
	JUMLAH	395.000.000,-

BAB IV PENUTUP

Demikian dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2024 sebagai komitmen Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis dalam melaksanakan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Semoga dokumen Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Tahun 2024 ini dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Ciamis, Oktober 2023

Kepala Dinas Sosial



Eka Permana Oktaviana, ST, M.A.P.
Pembina Utama Muda, IV/b
NIP. 19761014 200212 1 005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kab. Ciamis
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 Dinas Sosial

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur
	Dinas Sosial							14.034.730.602,00			15.569.691.063,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.012.530.602,00			15.545.271.063,00	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							14.012.530.602,00			15.545.271.063,00	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL							919.364.500,00			1.011.300.950,00	
1	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)							99.825.000,00			109.807.500,00	
1	01	02	01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT							
						Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota		59.895.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		65.884.500,00	
						- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		5 Keluarga			5 Keluarga	
						- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		-				
1	06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT							
						Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		39.930.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		43.923.000,00	
						- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		5 Keluarga			5 Keluarga	
						- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		-				
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						14.641.000,00	
1	06	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberitaan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang		13.310.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14.641.000,00	
						- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		10 Dokumen			10 Dokumen	
						- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kell/Desa		-				
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						886.652.450,00	
1	06	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota							

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	-	Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	-	70.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	50 Orang	77.000.000,00
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Orang	-	109.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	30 Orang	120.505.000,00
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Orang	-	77.175.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 Orang	84.892.500,00
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	-	57.919.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	63.710.900,00
1	06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Celandangan Pengemis dan Masyarakat	-	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	-	57.919.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 Orang	63.710.900,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target
1		-	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	25 Orang	-	18.175.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	19.992.500,00
1		-	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	10 Orang	-	5.535.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	6.088.500,00
1		-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Orang	25 Orang	-	14.815.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	16.296.500,00
1		-		-	-								

Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target		
1	06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	100 Orang	-	73.063.502,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	80.369.662,00
1	06	05	2.01	01	-	-	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	2 Dokumen	-	26.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	2 Dokumen	29.282.000,00
1	06	05	2.01	01	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-	7.708.626.500,00	-	-	-	8.479.489.150,00
1	06	05	2.01	01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	-	-	-	-	-	-	99.825.000,00	-	-	-	109.807.500,00
1	06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	-	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	15 Orang	-	33.275.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	36.602.500,00
1	06	05	2.01	02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	-	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	15 Orang	-	33.275.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	36.602.500,00
1	06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	-	Jumlah Anak Terlantar yang Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	15 Orang	-	33.275.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Anak Terlantar yang Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	36.602.500,00
1	06	05	2.02	01	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	15 Orang	-	7.608.801.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	15 Orang	8.369.681.650,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Pagu Indikatif (Rp.)	Tolok Ukur	Target
1 06 06 2.01 02	Penyediaan Sandang	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaklanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1000 Orang	-	11.595.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permaklanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang	12.754.500,00
1 06 06 2.01 03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakatan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Orang	-	2.595.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakatan dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	2.854.500,00
1 06 06 2.01 04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	-	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Unit	-	40.845.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Unit	44.929.500,00
1 06 06 2.01 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	-	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Orang	-	12.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Orang	13.200.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
1	06	07	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	226 Makam	83.280.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	226 Makam	91.608.000,00
1	06	01	2.01	03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	0 Laporan	0,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0 Laporan	0,00
1	06	01	2.01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	06	01	2.01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	12 Dokumen	55.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	61.050.000,00
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	1 Dokumen	2.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.640.000,00
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	1 Dokumen	2.510.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.761.000,00
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	1 Dokumen	2.510.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.761.000,00

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
1	06	01	2.02	03	-	Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	1 Dokumen	-	12.620.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyelidikan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	13.882.000,00
1	06	01	2.02	03	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	-	-	12 Dokumen	-	37.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	41.140.000,00
1	06	01	2.02	04	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	1 Dokumen	-	5.340.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	5.874.000,00
1	06	01	2.02	05	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	1 Laporan	-	2.083.725,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.292.085,00
1	06	01	2.02	07	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	-	-	1 Laporan	-	1.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	2.090.000,00
1	06	01	2.02	08	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	-	-	1 Laporan	-						

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Catatan Penting	Target Capaian Kinerja					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
1	06	01	2.06	05	-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	12 Paket	-	10.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	11.550.000,00
1	06	01	2.06	05	-	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	-	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	12 Paket	-	22.606.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Paket	24.866.600,00
1	06	01	2.06	09	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	250 Laporan	-	158.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	250 Laporan	174.339.000,00
1	06	01	2.07	06	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	10 Unit	-	463.170.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Unit	509.487.000,00
1	06	01	2.08	02	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	12 Laporan	-	3.660.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	4.026.000,00
1	06	01	2.09	01	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	12 Laporan	-	48.900.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	53.790.000,00
1	06	01	2.09	01	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	- Kab. Ciamis, Semua Kecamatan, Semua Keli/Desa	12 Laporan	-	231.634.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	12 Laporan	254.808.125,00

